

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier.

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meratakan pembagian pendapatan masyarakat, bila hal tersebut tidak tercapai maka akan terjadi disparitas pembangunan. Disparitas pembangunan tersebut apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya keengganan masyarakat untuk mengikuti kebijakan pemerintah daerah, tingkat pembayaran pajak yang relatif rendah sampai pada keinginan untuk memisahkan diri.

Todaro (2006:248) menyebutkan bahwa disparitas pendapatan dapat menyebabkan tiga hal diantaranya yaitu:

1. Inefisiensi ekonomi, pada tingkat pendapatan rata-rata berapapun, ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit yang lain. Ketika individu yang berpenghasilan rendah tidak dapat meminjam uang, pada umumnya mereka tidak dapat menyediakan pendidikan yang memadai bagi anak mereka ataupun memulai dan mengembangkan bisnis.
2. Melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, lebih celaka lagi, ketimpangan yang tinggi justru memperkuat kekuatan politis golongan kaya di samping kekuatan tawar menawar ekonomi mereka, biasanya kekuatan ini akan digunakan untuk mengarahkan berbagai hasil pembangunan demi kepentingan mereka sendiri. Dengan ketimpangan yang tinggi, fokus politik sering cenderung kepada redistribusi “kue” ekonomi yang ada dan bukan memperbesar “kue”-nya.

3. Ketimpangan yang ekstrem pada umumnya dipandang tidak adil.

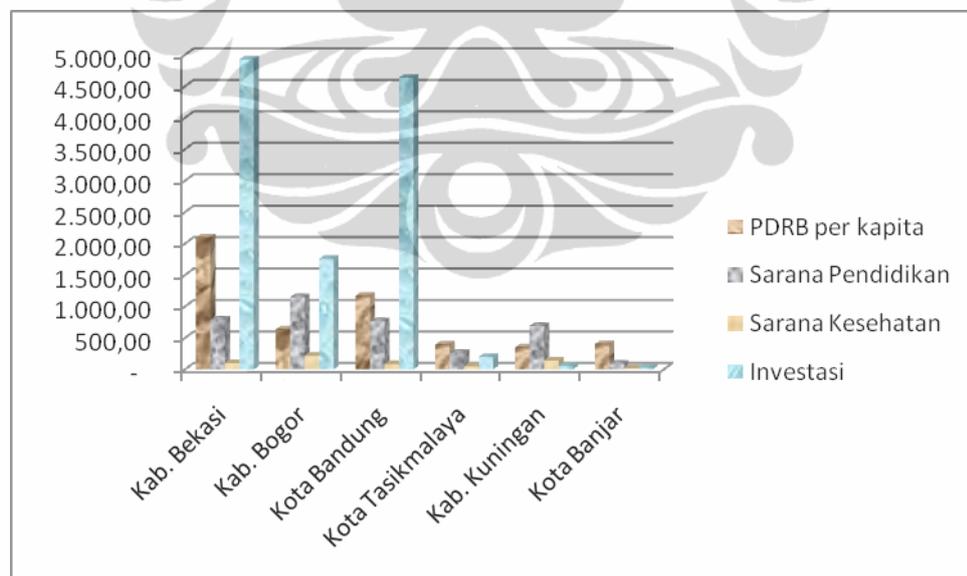
Ketimpangan yang terjadi di daerah dapat disebabkan oleh pola pendekatan perencanaan yang lebih berorientasi pada *top down planning* dengan ego sektoral yang tidak didasari pada kondisi, potensi, peluang dan permasalahan yang dimiliki daerah masing-masing. Daerah yang kaya biasanya memiliki potensi yang dimanfaatkan dengan baik misalnya kawasan industri, tenaga kerja yang terampil, ataupun lalu lintas perdagangan. Sedang daerah yang miskin adalah daerah yang memiliki potensi tapi belum dimanfaatkan dengan baik atau tidak memiliki potensi kekayaan, kualitas sumber daya tertentu.

Terjadinya disparitas pendapatan antar daerah juga disebabkan oleh adanya keterbatasan sarana dan prasarana (infrastruktur) seperti transportasi darat, laut, udara dan telekomunikasi serta tersedianya tenaga listrik yang sangat berpengaruh terhadap aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Terbatasnya sarana pendidikan maupun tenaga pendidikan yang profesional dan berkualitas juga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (Gita, 2005)

Provinsi Jawa Barat sebagai bagian internal dari perekonomian nasional dan yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data tahun 2008 mempunyai luas sebesar 3.710.061,132 hektar dengan garis pantai sepanjang 755,829 km dan jumlah penduduk sebesar 42,19 juta jiwa. Kondisi geografis Jawa Barat yang strategis ini merupakan keuntungan bagi Provinsi Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan sehingga Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah provinsi termaju di Indonesia.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan kemajuan yang pesat dan dinamis, dimana terlihat dari tumbuhnya pusat-pusat perdagangan yang ditopang oleh perkembangan sektor industri kecil dan menengah yang meretas jalan menjadi sektor andalan. Kemajuan ekonomi Provinsi Jawa Barat memberikan keyakinan akan berdampak positif bagi peningkatan masyarakat. Disamping itu, tumbuhnya kesadaran dan kesungguhan pemerintah untuk lebih mensejahterakan rakyat, dengan mengalokasikan

anggaran belanja publik yang lebih berpihak pada rakyat, utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Menumbuhkan keyakinan bahwa tujuan utama pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat, yaitu terciptanya manusia yang unggul (sehat, pintar dan berpenghasilan baik) akan dapat diraih dengan mudah. Namun kemajuan ekonomi tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan, karena pada kenyataannya masih terdapat perbedaan pembangunan ekonomi diantara kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Salah satu penyebab perbedaan pembangunan ekonomi tersebut adalah adanya perbedaan ketersediaan unsur penunjang (sarana dan prasarana) pembangunan manusia juga perbedaan alokasi investasi dimana daerah yang berada di dekat ibu kota negara, DKI Jakarta dan pusat pemerintahan mempunyai unsur penunjang pembangunan manusia dan alokasi investasi yang cukup tinggi, sedangkan daerah yang berada di wilayah selatan dan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah ketersediaan unsur penunjang pembangunan manusia masih rendah, begitu juga alokasi investasinya (Grafik 1.1).



Sumber : data diolah

Grafik 1.1. Distribusi PDRB per kapita ADHK 2000, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan dan Alokasi Investasi Beberapa Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Tabel 1.1. Distribusi PDRB per kapita ADHK 2000, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan dan Alokasi Investasi Beberapa Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Kab/Kota	PDRB per kapita (10 ribu)	Sapdik (unit)	Sapkes (unit)	Investasi (milyar)
Kab. Bekasi	2.097,86	794	794	4.927,27
Kab. Bogor	635,11	1.148	217	1.758,97
Kota Bandung	1.169,08	766	84	4.637,18
Kota Tasikmalaya	394,19	265	48	199,69
Kab. Kuningan	349,29	689	142	52,03
Kota Banjar	401,19	89	19	27,76

Sumber: : Data diolah

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa disparitas pendapatan antar kabupaten/kota merupakan salah satu masalah yang harus sesegera mungkin ditangani. Namun dengan keterbatasan sumber daya yang ada tidak mungkin untuk membangun semua wilayah secara keseluruhan, untuk itu diperlukan suatu kebijakan prioritas pengembangan daerah perbatasan yang masih sangat tertinggal.

Salah satu langkah awal untuk mengetahui disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat adalah dengan membuat suatu analisis disparitas pendapatan yang dilanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas pendapatan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya dalam jangka panjang, namun peningkatan pendapatan tersebut harus diiringi dengan pemerataan pendapatan di daerah tersebut. Ketidakmerataan pendapatan berdampak pada munculnya permasalahan diantaranya keengganan masyarakat untuk mengikuti kebijakan pemerintah daerah sampai pada keinginan untuk memisahkan diri dari daerah tersebut. Hal itu juga dialami oleh Provinsi Jawa Barat, adanya

disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dianggap sebagai issue strategis yang harus segera diantisipasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan garis besar permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Seberapa besar tingkat disparitas (*degree of disparity*) pendapatan di Provinsi Jawa Barat dan kecenderungannya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta kecenderungannya.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyusun kebijakan perencanaan pembangunan dalam rangka mengurangi disparitas pendapatan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat prioritas kebijakan perencanaan pembangunan dalam rangka mengurangi disparitas pendapatan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.5. Perumusan Hipotesis

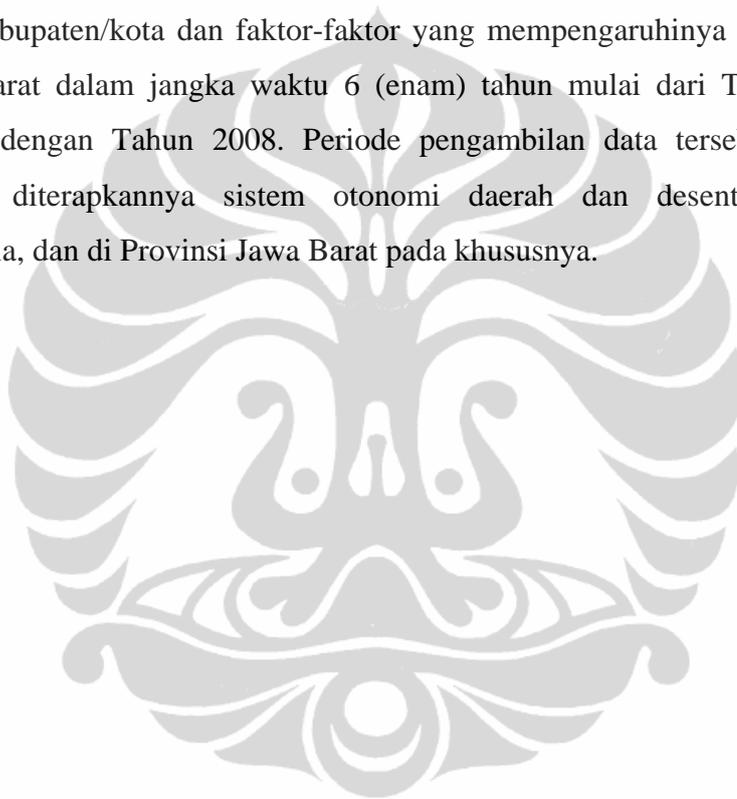
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga tingkat disparitas (*degree of disparity*) pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2008 sangat tinggi namun cenderung menurun.

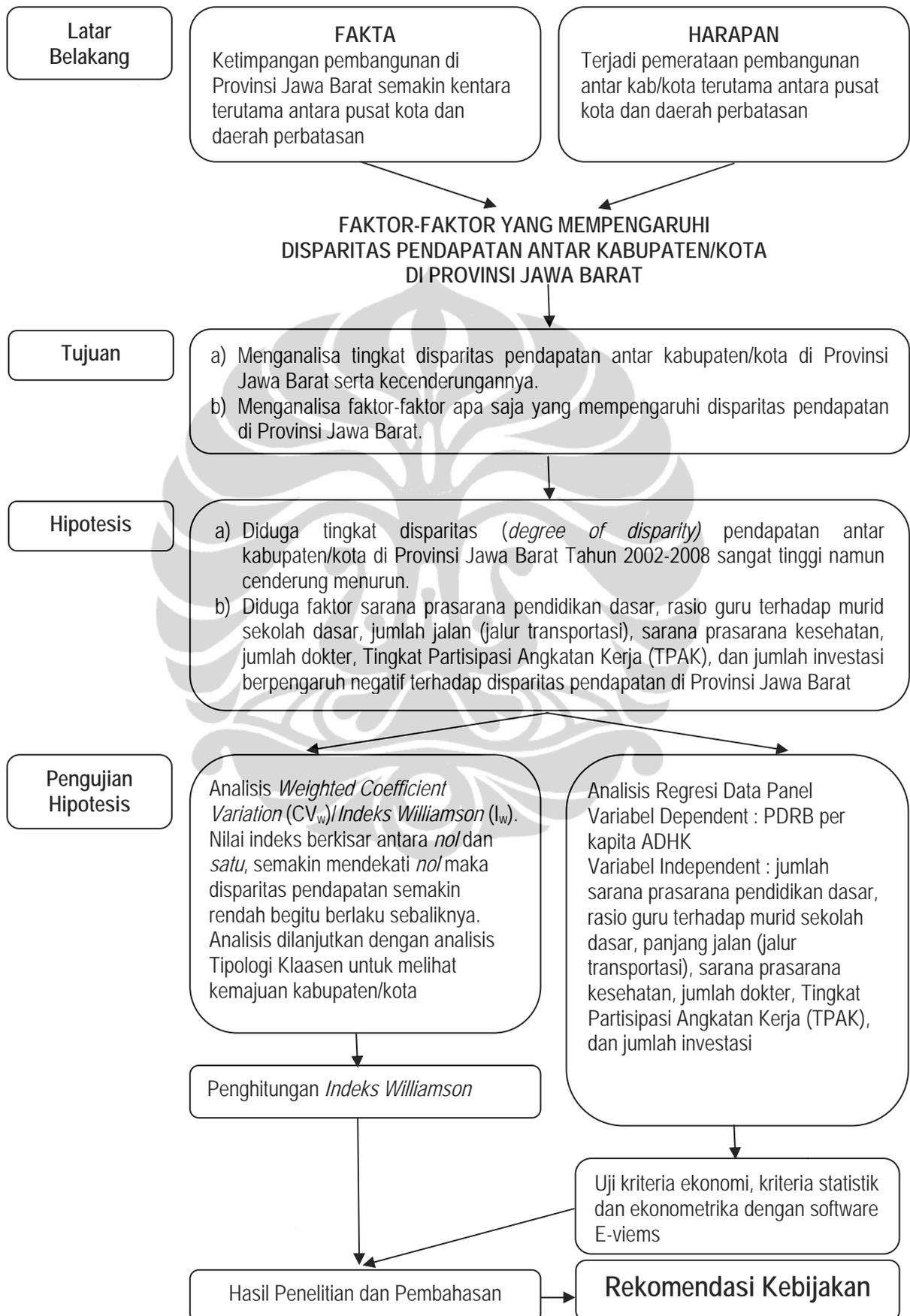
2. Diduga faktor sarana prasarana pendidikan dasar, rasio guru terhadap murid sekolah dasar, panjang jalan (jalur transportasi), sarana prasarana kesehatan, jumlah dokter, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan jumlah investasi berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

1.6. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada perhitungan tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu 6 (enam) tahun mulai dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008. Periode pengambilan data tersebut seiring dengan diterapkannya sistem otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Barat pada khususnya.



1.7. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah



1.8. Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kerangka pikir pemecahan masalah serta ruang lingkup dan batasan.

Bab II : Tinjauan Literatur

Kajian literatur tentang pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan, ekonomi regional serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan wilayah. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang gambaran perekonomian di wilayah penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Memaparkan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian. Selain itu, pada bab ini memaparkan sumbangan pemikiran dan penilaian dari pengamatan dan analisis data.

Bab V : Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, akan diberikan juga rekomendasi kebijakan terhadap hal-hal yang menjadi masalah.